

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tugas akhir ini tentang clustering permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai Kelurahan Selat Hulu. Sebelum pembahasan lebih lanjut, pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan Bantaran sungai; Permukiman; Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman; Permukiman kumuh, Karakteristik dan Penyebabnya; dan Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh.

2.1 Bantaran Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai, pengertian bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Sedangkan tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alami yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawa oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.

Menurut Poedjioetami (2008), permukiman kawasan bantaran sungai merupakan permukiman padat yang menempati lahan di tepi sungai sehingga sering kali terjadi pengotoran sungai, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banjir, kekumuhan, dan sebagainya. Di samping itu juga permukiman kawasan bantaran sungai menempati batas lahan yang semestinya tidak boleh didirikan bangunan. Tetapi disisi lain pastinya penghuni di kawasan tersebut sudah bertempat tinggal di lokasi tersebut selama bertahun-tahun sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan hidup dari penghuni telah berjalan dengan baik, hanya saja lokasinya perlu dibenahi agar membuat lingkungan sekitar menjadi lebih terawat dan lebih nyaman untuk ditinggali. Permukiman sekitar bantaran sungai pada umumnya adalah permukiman yang marginal, yang artinya bangunan menempati lahan yang tidak semestinya. Untuk solusi mengenai permukiman liar yang berada di kawasan bantaran sungai adalah dengan penggusuran atau penghunian

kembali penduduk lama ke tempat baru yang lebih layak atau bisa disebut relokasi.

2.2 Permukiman

Permukiman merupakan ruang yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan sarana dan prasarana yang mendukung. sehingga manusia bisa tinggal di dalamnya dengan damai dan tetap sehat. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut Setiawan (2017), permukiman didefinisikan sebagai kombinasi komponen perumahan, lingkungan dan kehidupan dari masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kualitas komponen permukiman dapat menggambarkan bagaimana kondisi permukiman tersebut. Sedangkan menurut Mbina Pinem (2011), ia mengartikan permukiman dalam dua kategori antara lain; arti secara sempit dan arti secara luas. Dalam arti sempit, permukiman adalah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal, sedangkan dalam arti luas permukiman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat tinggal.

Menurut Komang (2017), permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Dapat berupa kawasan perkotaan atau pedesaan berfungsi sebagai tempat tinggal/huni dan tempat kegiatan prikehidupan dan penghidupan. Permukiman juga dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah, dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman. Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan pembangunan perumahan yang sehat.

2.3 Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman

Prasarana dan sarana merupakan penunjang kegiatan fungsi dalam suatu kawasan permukiman, sehingga apabila prasarana dan sarana di suatu kawasan permukiman sangat minim maka akan berdampak pada ketidakseimbangan pada lingkungan permukiman.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Sedangkan untuk sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, ruang terbuka hijau, taman-taman, dan lapangan olahraga.

2.4 Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No.1 tahun 2011 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh daerah perkotaan khususnya di negara berkembang. Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh di antaranya yaitu memperburuk wajah kota, berkembangnya kemiskinan di perkotaan, bencana banjir maupun kebakaran.

Menurut Beddu & Yahya (2015), lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks, di antaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kesenjangan serta tidak disiplinnya

masyarakat terhadap lingkungannya maupun yang menyangkut kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan kota/kabupaten dalam pengaturan, pengorganisasian tata ruang dan sumber daya yang dimiliki kota dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat kota.

Menurut Komang (2017), permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan baik secara teknis maupun non teknis, suatu permukiman kumuh dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah masyarakat miskin dan banyak kita jumpai juga di kawasan perkotaan. Ia juga menyebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan dapat menyebabkan lahirnya berbagai permasalahan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya.

2.5 Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki karakteristik sebagai berikut: (Amri, 2013)

1. Sarana dan prasarana air bersih belum terdistribusi merata, pembuangan air kotor dan pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan,
2. Kualitas lingkungan yang rendah,
3. Kualitas bangunan yang rendah dan tidak layak huni,
4. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan
5. Tingkat kemiskinan yang tinggi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Muvidayanti (2019), menyatakan bahwa permukiman kumuh memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan mempunyai tingkat kepadatan tinggi serta kelayakan bangunan kurang karena 1 rumah dihuni oleh 2-3 KK,
2. Sumber air bersih menggunakan sumur artesis dan PDAM,

3. Sistem per limbah menggunakan kloset pribadi dilengkapi dengan tangki septik dan sebagian menggunakan kamar mandi umum tanpa adanya tangki septik,
4. Pengelolaan sampah rumah tangga belum ada pemilahan sampah,
5. Belum ada sarana prasarana proteksi kebakaran,
6. Permukaan jalan lingkungan tertutup paving dan tanah dengan kondisi baik dan sebagian rusak bergelombang, dan
7. Kondisi drainase lingkungan yang kurang baik karena tersumbat sampah sehingga ketika hujan terjadi genangan,

Menurut Niken Fitria & Rulli Pratiwi Setiawan (2014), permukiman kumuh dapat di bagi menjadi beberapa kategori yaitu permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang, dan permukiman kumuh berat. Berdasarkan kategori tersebut memiliki karakteristik mereka masing-masing, antara lain sebagai berikut :

1. Permukiman kumuh ringan, keberadaan kegiatan ekonomi yang berada di sekitarnya turut mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh permukiman tersebut, seperti misalnya dalam hal kondisi prasarana drainase, asal daerah masyarakat, status kependudukan masyarakat, asal pemilihan lokasi bermukim, dan juga jenis pekerjaan masyarakat.
2. Permukiman kumuh sedang, umumnya kondisinya cenderung menengah, dimana terdapat beberapa aspek yang memiliki kesamaan dengan permukiman kumuh ringan, seperti misalnya dalam hal tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan ketinggian genangan. Namun terdapat beberapa aspek pula yang memiliki kesamaan dengan permukiman kumuh berat, seperti dalam hal kondisi prasarana drainase, alasan pemilihan lokasi bermukim, dan status kependudukan masyarakat.
3. Permukiman kumuh berat, ternyata terdapat kecenderungan bahwa semakin buruk tingkat kategori kumuhnya, semakin buruk pula kondisinya dibandingkan dengan kedua kategori

permukiman kumuh lainnya (ringan dan sedang) terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan juga bahaya (hazard) terhadap banjir/genangan.

Dari beberapa hasil pengamatan di atas bisa disimpulkan bahwa karakteristik permukiman kumuh bisa dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa hal yang sangat menonjol yaitu disebabkan oleh kualitas bangunan sangat tidak layak huni dan biasanya dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga, kemudian karena sarana dan prasarana air bersih belum memadai dan belum terdistribusi secara merata, dan yang terakhir yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga mereka belum mampu untuk membangun bangunan yang lebih layak untuk dihuni.

2.6 Penyebab Permukiman Kumuh

Di setiap wilayah di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan permukiman kumuh, hal tersebut terjadi akibat dari perilaku manusia itu sendiri yang tidak pernah memperhatikan tempat tinggal mereka. Menurut Muvidayanti (2019), salah satu penyebab dari munculnya permukiman kumuh karena adanya ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi yang terpusat pada daerah perkotaan sehingga menyebabkan adanya migrasi dari desa ke kota.

Menurut Suud dan Navitas (2015), ada beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh, antara lain:

- 1) Faktor laju pertumbuhan penduduk yang tinggi,
- 2) Faktor kepadatan penduduk yang tinggi,
- 3) Faktor kondisi pelayanan air bersih yang belum merata dalam menjangkau masyarakat,
- 4) Faktor kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak,
- 5) Faktor kondisi fasilitas persampahan yang buruk,
- 6) Faktor kondisi saluran air hujan/drainase yang belum berfungsi dengan baik,

- 7) Faktor kondisi jalan yang buruk baik dari segi perkerasan maupun lebar jalan,
- 8) Faktor keterbatasan ruang terbuka,
- 9) Faktor jenis pekerjaan informal dengan pendapatan rendah,
- 10) Faktor tingkat pendidikan yang rendah,
- 11) Faktor keterbatasan lahan permukiman,
- 12) Faktor kesadaran masyarakat yang rendah dalam memelihara lingkungan.

Menurut Kaspan Eka Putra (2017), permukiman kumuh merupakan salah satu masalah perkotaan yang timbul akibat dari tidak mempunyai sebuah kawasan mengikuti alur pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga menimbulkan kemiskinan yang berdampak pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik kawasan tersebut. Faktor-faktor penyebab permukiman kumuh digolongkan menjadi 4 (empat), sebagai berikut :

- 1) Faktor fisik

Kondisi fisik lingkungan dalam kawasan permukiman menjadi hal utama yang di perhatikan karena kebanyakan dari permukiman kumuh rumah-rumah di kawasan tersebut terbuat dari kayu dengan kondisi yang sudah usang dan biasanya atap rumah terbuat dari seng namun tidak dilapisi plafon sehingga akan sangat panas pada siang hari dan dingin pada malam hari.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang menyebabkan kepadatan bangunan sehingga tidak adanya jarak antar bangunan hunian yang sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga kawasan menjadi kumuh karena padatnya rumah yang dibangun. Jumlah penghuni dalam satu rumah juga ikut andil dalam membentuk suatu kawasan yang kumuh. Idealnya jumlah penghuni dalam satu rumah adalah 5 orang, apabila dalam satu rumah terdapat 6 atau lebih orang maka pemilik rumah akan menambah atau memperluas area bangunan rumah mereka tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku.

2) Faktor ekonomi

Kondisi perekonomian penghuni kawasan permukiman kumuh relatif rendah, mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan mereka pun tidak konsisten yang tentu saja kemampuan dari penghuni atau kepala keluarga untuk merealisasikan perbaikan lingkungan huniannya sangat kecil kemungkinannya.

3) Faktor persediaan infrastruktur lingkungan

Beberapa persediaan infrastruktur lingkungan yang dapat menyebabkan kekumuhan yang perlu di perhatikan seperti ketersediaan air bersih yang kurang, fasilitas MCK yang tidak terawat, sistem drainase kotor dan tersumbat, pembuangan air limbah yang belum sesuai dengan kriteria, jalan lingkungan serta penerangan jalan yang belum sesuai dengan ketentuan jalan lingkungan yang di atur pemerintah, dan kurang efisiennya petugas kebersihan dalam mengangkut sampah rumah tangga yang menyebabkan penumpukan sampah di sekitar rumah.

4) Faktor sosial dan budaya

Kondisi kesehatan masyarakat yang akan terancam akibat dari sampah yang menumpuk di sekitar rumah kawasan kumuh yang tentu akan menimbulkan bibit penyakit, ditambah aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi tidak sehat.

Kemudian terlihat dari mayoritas pekerjaan para penghuni yang rata-rata bekerja serabutan atau tidak tetap, tentu saja para penghuni tidak memiliki pendidikan yang tinggi dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan sektor informal yang tidak memiliki pendidikan khusus untuk dilakukan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan suatu wilayah menjadi kumuh adalah tidak adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan nyaman. Membuang limbah

rumah tangga dengan sembarangan di sekitar rumah atau langsung ke laut menyebabkan pemandangan sekitar menjadi kumuh dan kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang pasti akan menambah kekumuhan. Selain kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, kesadaran akan memelihara fasilitas umum juga tidak dimiliki oleh masyarakat, seperti fasilitas drainase atau pembuangan yang turut menambah masalah kekumuhan di kawasan permukiman.

2.7 Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- a. **Permukiman Kumuh di Atas Air**
Permukiman kumuh yang berada di atas air, baik di daerah sungai, laut, maupun rawa.
- b. **Permukiman Kumuh di Tepi Air**
Permukiman kumuh yang berada di tepi badan air namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
- c. **Permukiman Kumuh di Dataran Rendah**
Permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$
- d. **Permukiman Kumuh di Perbukitan**
Permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng $> 10\%$ dan $< 40\%$
- e. **Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana**
Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.

Berikut ini pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jenis Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Jenis Tipologi	Lokasi
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai, ataupun laut.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10% dan < 40%
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir

Sumber : Permen PU No.2 Tahun 2016



Sumber : kompasiana¹

Gambar 2.1

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air



Sumber : republika.co.id²

Gambar 2.2

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

¹https://www.kompasiana.com/daffa_rafiecena/5d4a6978097f3618952692b2/dicari-hunian-yang-sehat-diantara-pemukiman-yang-kumuh

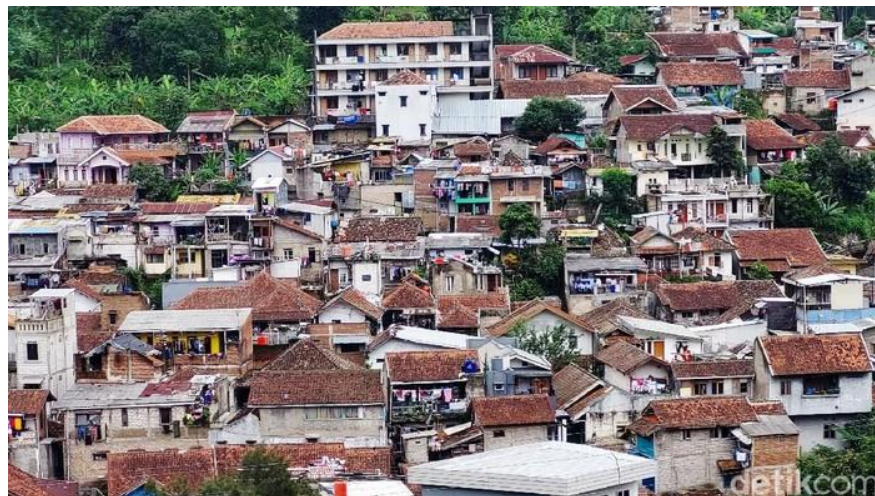
²<https://www.republika.co.id/berita/nsk876282/pemprov-dki-siapkan-perda-khusus-permukiman-bantaran-ciliwung>



Sumber : linajuntak.blogspot.com³

Gambar 2.3

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah



Sumber : detik.com⁴

Gambar 2.4

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan

³ <http://linajuntak.blogspot.com/2014/04/masalah-permukiman-kumuh-perkotaan.html>

⁴ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6144309/dpkp-ungkap-penyebab-munculnya-kawasan-kumuh-di-kota-bandung>



Sumber : antaranews.com⁵

Gambar 2.5

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/919591/permukiman-kumuh-masih-jadi-persoalan-pemprov-dki>